

**PENGARUH DANA PERIMBANGAN, PENDAPATAN ASLI DAERAH,
DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA
MODAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi



Diajukan Oleh:

MOCHAMMAD IQBAL SYAHRIAL RABFI

NPM. 2201120010.P

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TRIDENANTI
PALEMBANG**

2024

UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Mochammad Iqbal Syahrial Rabi'i
Nomor Pokok : 2201120010.P
Program Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan

Pembimbing Proposal

Tanggal 26 Sep 24

Pembimbing I : Dr. Rosalina Pebrica Mayasari, S.E., Ak. M.Si
NIDN. 0026028301

Tanggal 26 Sep 24

Pembimbing II : Riza Syahputra, SE, Ak, CA, CPAI M, Ak
NIDN. 0224108301

Mengetahui,

Dekan

Tanggal 27 Sep 2024



Dr. Misy. Mikhal, S.E., M.Si, Ak, CA, CSRS
NIDN. 0205026401

Ketua Program Studi

Tanggal 27 Sep 2024

Meti Zuliyana, SE, M.Si, Ak, CA, CSRS
NIDN. 0205056701

ii

010 / PS / DFEB / 24

UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Mochammad Iqbal Syahril Rabi'i
Nomor Pokok : 2201120010.P
Program Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan

Pembimbing Proposal

Tanggal 26 Sep 24 Ketua Penguji : Dr. Rosalina Pebrica Mayasari, S.E., Ak. M.Si
NIDN. 0026028301
Tanggal 26 Sep 24 Penguji I : Riza Syahranta, SE, Ak, CA, CPAI, MAk
NIDN. 0224108301
Tanggal 26 Sep 24 Penguji II : Sahila, S.E. MM
NIDN. 0221076502

Mengesahkan,

Dekan

Tanggal 27 Sep 2024



Dr. Msv. Mikhal, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS
NIDN. 0205026401

Ketua Program Studi

Tanggal 27 Sep 2024

Meti Zuliyana, SE, M.Si, Ak. CA, CS
NIDN. 0205056701

010 /PS/DFEB/24

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mochammad Iqbal Syahrial Rabi'i
NPM : 2201120010.P
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi
Judul : Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih
Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintahan
Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan jiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dengan konsekuensinya.

Palembang, 19 Sep 2024



Mochammad Iqbal Syahrial Rabi'i
NIM . 2201120010.P

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

"Setiap kesulitan yang datang membawa pelajaran berharga di baliknya, dan ujian ini hanyalah bagian dari perjalanan untuk membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Jangan fokus pada besarnya hambatan, tapi fokuslah pada potensi yang kamu miliki untuk melampauinya. Ketika kamu terus berusaha, hasil terbaik akan datang di waktu yang tepat."

"Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik."

~(Q.S Al-Ankabut 29:69)~

"Mereka yang berjuang keras di jalan Allah akan selalu ditunjukkan jalan keluar dari kesulitan, dan Allah selalu bersama mereka yang berbuat baik."

Kupersembahkan kepada :

1. Untuk Kedua Orangtuaku Tercinta
2. Kakak, Adik- Adik, Ipar dan Keponakanku Yang Kusayangi
3. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti
4. Sahabat dan Teman Seperjuangan
5. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan aspek penting yang harus diperhatikan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang efektif dan efisien. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Modal.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Modal dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan, sehingga dapat dijadikan acuan bagi pengambil kebijakan dalam mengelola keuangan daerah.

Dengan selesainya penelitian ini, penulis mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Edizai AE, MS. selaku Rektor Universitas Tridinanti.
2. Ibu Dr. Misy Mikial, SE, M.Si., Ak., CA., CSRS selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti.
3. Ibu Meti Zuliyana, SE, M.Si., Ak., CA., CSRS selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti.
4. Ibu Dr. Rosalina Pebrica Mayasari, S.E., Ak., M.Si. selaku pembimbing pertama yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan serta pengarahan dan saran-saran kepada peneliti selama menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Riza Syahputera, SE, Ak., CA., CPAI, MAk selaku pembimbing kedua yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan serta pengarahan dan saran-saran kepada peneliti selama menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti yang telah memberikan bekal ilmu selama masa studi.
7. Orang tua dan saudara-saudara penulis yang telah memberikan semangat, kasih sayang dan perhatian serta dukungan moril, material dan doanya untuk penulis.

8. Diri sendiri atas ketekunan, dedikasi dan semangat yang tidak pernah padam dengan segala tantangan dan rintangan yang dihadapi dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Teman seperjuangan Dwingky Renaldy selaku kakak senior di Akuntansi POLSRI dan masuk transisi bareng di Universitas Tridianti ini. Dan telah memberikan dukungan dengan membantu menyediakan dan meminjamkan peralatan seperti laptop dan printer untuk menyelesaikan penelitian ini. Pun juga sudah memberikan ilmu akuntansi selama 2 tahun pendidikan di Universitas ini.
10. Sahabat dan teman seperjuangan Angkatan 2022 Transisi Universitas Tridianti.

Semoga semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi peneliti dan rekan-rekan yang akan menyusun skripsi.

Palembang, Agustus 2024

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PROPOSAL.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kajian Teoritis.....	12
2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory).....	12
2.1.2 Belanja Modal.....	14
2.1.3 Dana Perimbangan.....	14
2.1.3.1 Dana Alokasi Umum (DAU).....	15
2.1.3.2 Dana Alokasi Khusus (DAK).....	16
2.1.3.3 Dana Bagi Hasil (DBH)	17
2.1.4 Pendapatan Asli Daerah	18
2.1.4.1 Pajak Daerah	19
2.1.4.2 Retribusi Daerah.....	20
2.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).....	20
2.2 Penelitian Terdahulu	21
2.3 Krangka Pemikiran	24
2.4 Hipotesis	27

2.4.1 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal.....	27
2.4.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal.....	28
2.4.3 Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal	29
2.4.4 Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal.....	30

BAB III METODELOGI PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	31
3.1.1 Tempat penelitian.....	31
3.1.2 Waktu Penelitian.....	31
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.2.1 Sumber Data.....	31
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.3 Populasi, Sampel, Sampling	33
3.3.1 Populasi	33
3.3.2 Sampel.....	34
3.3.3 Sampling.....	34
3.4 Rancangan Penelitian.....	35
3.5 Variabel dan Defenisi Operasional.....	35
3.5.1 Variabel Independen (X).....	35
3.5.2 Variabel Dependen (Y).....	38
3.5.3 Variabel Operasional.....	38
3.6 Instrumen Penelitian	39
3.7 Teknik Analisis Data.....	40
3.7.1 Uji Normalitas.....	40
3.7.2 Uji Asumsi Klasik.....	41
3.7.2.1 Uji Autokorelasi.....	41
3.7.2.2 Uji Multikorelasi.....	42

3.7.2.3 Uji Heterokedastisitas	42
3.7.3 Model Regresi Linear Berganda	43
3.7.4 Uji Hipotesis	43
3.7.4.1 Koefisien Determinasi	43
3.7.4.2 Uji Statistik (Uji-f)	44
3.7.4.3 Uji Parsial (Uji-t)	44
BAB IV PEMBAHASAN.....	45
4.1 Hasil Penelitian	45
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	45
4.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian	46
4.1.2.1 Belanja Modal	46
4.1.2.2 Dana Perimbangan	48
4.1.2.3 Pendapatan Asli Daerah	49
4.1.2.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	50
4.1.3 Statistik Deskriptif	52
4.1.4 Hasil Uji Normalitas	53
4.1.5 Hasil Uji Asumsi Klasik	54
4.1.6 Hasil Uji Autokorelasi	55
4.1.7 Hasil Uji Multikolinearitas	56
4.1.8 Hasil Uji Heterokedastisitas	57
4.1.9 Hasil Model Regresi Linear Berganda	58
4.1.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi	60
4.1.11 Hasil Uji Hipotesis	60
4.1.11.1 Hasil Uji F (Uji Simultan)	60
4.1.11.2 Hasil Uji T (Uji Parsial)	61
4.2 Pembahasan	62

4.2.1 Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal.....	62
4.2.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal.....	63
4.2.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.....	64
4.2.4 Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal.....	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	67
5.2 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu.....	21
3.1 Daftar Kabupaten atau Kota Sumatera Selatan.....	33
3.2 Sampel Penelitian.....	34
3.3 Variabel Operasional.....	39
4.1 Nama Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.....	45
4.2 Realiasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022.....	47
4.3 Realiasi Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022.....	48
4.4 Realiasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022.....	50
4.5 Realiasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022.....	51
4.6 Statistik Deskriptif.....	52
4.7 Hasil Uji Kolmogorov Smirnov.....	54
4.8 Hasil Uji Autokorelasi.....	55
4.9 Hasil Uji Multikolinieritas.....	56
4.10 Model Regresi Linier Berganda.....	58
4.11 Uji Koefisien Determinan Adjusted R-square.....	60
4.12 Uji Statistik F.....	60

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Realisasi Belanja Modal pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan	5
2.1 Kerangka Pemikiran.....	26
4.1 Hasil Normalitas Probabilitas Plot	53
4.2 Hasil Uji Scatterplot	57

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 Realisasi Anggaran dalam Logaritma Natural Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022
- LAMPIRAN 2 Realisasi Anggaran dalam rupiah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022
- LAMPIRAN 3 OUTPUT SPSS

ABSTRAK

MOCHAMMAD IQBAL SYAHRIAL RABI'L. PENGARUH DANA PERIMBANGAN, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN. (Dibawah bimbingan Ibu Dr. Rosalina Pebrica Mayasari, S.E.,Ak. M.Si dan Bapak Riza Syahputera, SE.,Ak,CA, CPAI M.Ak)

Kemampuan pemerintah daerah dalam menerapkan aturan pengelolaan keuangan dengan benar dan efektif untuk memberikan layanan yang diinginkan adalah dengan melihat kinerja keuangan pemerintah daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dana perimbangan, pendapatan asli daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2018-2022. Dana perimbangan, Pendapatan asli daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah tolak ukur dalam menilai kemandirian suatu daerah dalam penerapan desentralisasi fiskal.

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bersumber dari situs resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan jumlah populasi sebanyak 17 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan non-probability dengan metode sampling jenuh. Analisis data yang digunakan yaitu regresi linier berganda.

Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa dana perimbangan, pendapatan asli daerah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara bersamaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Untuk pengujian secara parsial mendapatkan hasil bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Belanja Modal Pemerintah Daerah

ABSTRACT

MOCHAMMAD IQBAL SYAHRIAL RABI'L THE INFLUENCE OF BALANCED FUNDS, REGIONAL ORIGINAL INCOME, AND EXTRA BUDGET FINANCING ON CAPITAL EXPENDITURES IN REGENCY/CITY GOVERNMENTS IN SOUTH SUMATRA PROVINCE. (Under the guidance of Mrs. Dr. Rosalina Pebrica Mayasari, S.E., Ak. M.Si and Mr. Riza Syahputera, SE.Ak, CA, CPAIMLak)

The ability of local governments to apply financial management rules correctly and effectively to provide the desired services is based on looking at the financial performance of local governments. The aim of this research is to find out whether balancing funds, local original income and excess budget financing have an effect on capital expenditure in Regency/City regional governments in South Sumatra Province for the 2018-2022 fiscal year. Balancing funds, original regional income and excess budget financing are benchmarks in assessing the independence of a region in implementing fiscal decentralization.

This research uses quantitative data and secondary data in the form of reports on the realization of regional income and expenditure budgets sourced from the official website of the Supreme Audit Agency (BPK) with a population of 17 districts/cities in South Sumatra Province. The sampling technique in this study used non-probability with a saturated sampling method. The data analysis used is multiple linear regression

Simultaneous test results show that balancing funds, local original income, and excess budget financing simultaneously influence the financial performance of local governments. For partial testing, the results were that the balancing fund had no influence on the financial performance of the regional government, while the balancing fund and excess budget financing had an effect on the financial performance of the regional government.

Keywords: Original Regional Income, Balancing Fund, Excess Budget Financing, Regional Government Capital Expenditure

RIWAYAT HIDUP

Mochammad Iqbal Syahrial Rabi'i, dilahirkan di Palembang pada tanggal 06 September 2001 dari Ayah Erwin dan Ibu Apriarina. Ia anak pertama dari dua bersaudara.

Sekolah Dasar diselesaikan pada tahun 2013 di SDN 18 Muara Enim, Sekolah Menengah Pertama diselesaikan pada tahun 2016 di SMP Negeri 4 Palembang dan selanjutnya menyelesaikan Sekolah Menengah Atas pada tahun 2019 di SMAN 5 Palembang dan melanjutkan Pendidikan Diploma III yang diselesaikan pada tahun 2022 di Politeknik Negeri Sriwijaya. Pada tahun 2022, ia melanjutkan pendidikan Strata 1 memasuki Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Tridinanti.

Palembang, 30 Agustus 2024

M Iqbal Syahrial R

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari daerah-daerah provinsi yang didalamnya terdiri dari kabupaten dan kota. Seluruh daerah di Indonesia, berhak dan berkewajiban untuk mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pemerintahannya sendiri guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan masyarakat. Masyarakat di Indonesia mengenal istilah otonomi daerah sejak diberlakukannya Undang undang (UU) mengenai pemerintah daerah (Pemda) berdasarkan (UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014) tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Subandi (2014.133) Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industry-industri alternatif, perbaikan kepastian tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasarpasar baru, alih pengetahuan dan teknologi, serta pembangunan usaha usaha baru. Pemerintah daerah, khususnya kabupaten/kota, memegang peranan penting dalam merealisasikan tujuan tersebut melalui pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Salah satu aspek kunci dari pengelolaan keuangan daerah adalah belanja

modal, yang berfungsi untuk mendanai investasi dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik lainnya yang memiliki dampak jangka panjang bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Belanja modal digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Infrastruktur yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dalam rangka mengoptimalkan alokasi belanja modal, pemerintah daerah memanfaatkan berbagai sumber pendanaan yang tersedia. Di antaranya adalah Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Ketiga sumber pendanaan ini memiliki peran dan karakteristik yang berbeda-beda, namun saling melengkapi dalam upaya memenuhi kebutuhan belanja modal. Dana perimbangan, pendapatan asli daerah, silpa penting bagi belanja modal, karena dana perimbangan memberikan dukungan dari pusat untuk pemerataan pembangunan, PAD memberikan kemandirian dan responsivitas lokal, sementara SiLPA memberikan fleksibilitas dan kesinambungan anggaran. Kombinasi ketiga sumber ini memungkinkan pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan yang efektif dan efisien.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No.41 Tahun 2021, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas dana transfer umum dan dana transfer khusus. Dana Perimbangan, yang

terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), merupakan transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah serta membantu daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Sementara itu, PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam wilayahnya sendiri yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan pendapatan asli daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Adapun SiLPA adalah sisa dana dari APBD tahun sebelumnya yang tidak terserap atau tidak terpakai dan dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya.

Provinsi Sumatera Selatan, dengan berbagai karakteristik ekonomi dan sosialnya, memberikan contoh menarik untuk diteliti terkait pengaruh Dana Perimbangan, PAD, dan SiLPA terhadap belanja modal di tingkat pemerintah kabupaten/kota. Dikarenakan Setiap kabupaten/kota di provinsi ini memiliki tingkat ketergantungan yang berbeda terhadap masing-masing sumber pendanaan tersebut, yang pada gilirannya mempengaruhi kemampuan mereka dalam melakukan investasi modal, dan juga Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi ekonomi besar, terutama dalam sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Ini memberikan konteks yang kaya untuk mengkaji bagaimana belanja modal dapat mendukung pembangunan ekonomi dan infrastruktur.

Tujuan dari otonomi daerah menurut (UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, adalah untuk). Meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong partisipasi dan prakarsa masyarakat, serta mengintegrasikan potensi daerah secara realistis, optimal, terpadu dan dinamis, serta bertanggung jawab untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan mengurangi beban pemerintah pusat serta campur tangan terhadap daerah dan memberikan peluang untuk koordinasi di tingkat lokal atau daerah merupakan Berdasarkan tujuan tersebut pemerintah diharapkan mampu mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah atau negara. Dalam rangka pertanggung jawaban publik atas pengelolaan keuangan daerah, Pemda harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pada hakikatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemda serta tugas pokok dan fungsi unit kerja, harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja tertentu.

APBD terdiri atas tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Salah satu komponen APBD yaitu belanja daerah merupakan rencana keuangan mengenai belanja daerah yang terdiri atas beberapa komponen salah satunya adalah belanja modal. Belanja Modal atau biasa dikenal dengan belanja daerah merupakan semua pengeluaran Pemda dalam satu tahun anggaran yang berisikan biaya dan harus dikeluarkan oleh Pemda dalam

melaksanakan program kerja pemerintah. Komposisi belanja daerah harus diperhatikan sebaik mungkin dalam menunjang kebutuhan fasilitas publik agar dapat meningkatkan kepercayaan publik atas kinerja Pemda. Apabila kepercayaan publik ini meningkat, maka tentunya dapat meningkatkan kontribusi masyarakat dalam membayar pajak daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk meningkatkan pelayanan publik, alokasi belanja daerah harus mengalami perubahan, bila sebelumnya lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai dan belanja rutin yang kurang produktif, maka jika ingin meningkatkan pelayanan publik harus lebih memprioritaskan alokasi belanja modal. Menurut (UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, 2019) menyebutkan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan ke daerah untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka desentralisasi. Pengelolaan daerah akan meningkatkan kinerja Pemda jika dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah pusat memberlakukan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan yang mana dana perimbangan

terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Gambar 1.1 Realisasi Belanja Modal pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa alokasi belanja modal untuk Kabupaten atau Kota di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2018-2022 masih rendah atau belum optimal. Hal ini terbukti bahwa rata-rata pengalokasian belanja modal Kabupaten atau Kota di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2018-2022 masih 26.11%. Menurut ("PP No 5 Tahun 2010," 2010) peraturan presiden (Perpres) No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang mana secara keseluruhan jumlah belanja modal yang



dialokasikan dalam APBD sedikit-dikitnya 29% dari belanja daerah, sedangkan pada Kabupaten atau Kota di Provinsi Sumatera Selatan rata-rata masih 26.11%.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten atau Kota di Provinsi Sumatera Selatan masih sedikit menggunakan belanja modal dari belanja daerahnya. Kabupaten kota yang masih menunjukkan olaksi belanja modal yang belum optimal adalah Kabupaten Banyuasin, Lahat, Musi Rawas, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur, Lubuk Linggau, Pagar Alam, Palembang, Prabumulih

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Muttaqin et al., 2021), belanja modal pada pemerintahan kabupaten Langkat masih terdapat sinergitas pusat melalui desentralisasi kepada Pemda dalam berkontribusi terhadap alokasi keuangan negara. PAD kabupaten Langkat sudah sangat baik untuk membiayai belanja modal daerahnya. Semakin besar PAD di kabupaten Langkat maka penerimaan yang digunakan dalam penyediaan dan pengadaan pelayanan dan fasilitas publik semakin baik untuk masyarakat kabupaten Langkat. Pada penelitian tersebut selain PAD yang mempengaruhi belanja modal juga terdapat dana perimbangan yang menyatakan bahwa semakin besar dana perimbangan maka semakin besar pula pengalokasian terhadap belanja modal.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Made Ari Juniawan & Ni Putu Santi Suryanti, 2018), Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kota dan kabupaten di Provinsi Bali. Populasi penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Provinsi bali, metode yang digunakan dalam penentuan sampel pada penelitian ini adalah metode sampling jenuh. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini

adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Andreas Marzel Pelealu, 2013), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber-sumber penerimaan daerah. Adanya DAK dan PAD menyebabkan pemerintah daerah dituntut untuk sebaik mungkin dalam penggunaan kedua dana tersebut, dalam merealisasikannya lewat pembangunan yang bermanfaat dan memberikan kepuasan bagi masyarakat di daerah sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh DAK dan PAD terhadap belanja modal pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAK dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah Kota Manado.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ida Bagus Badjra, I Ketut Mustanda, Nyoman Abudanti, 2017), pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Provinsi Bali. Populasi penelitian ini adalah seluruh kota/kabupaten di Bali. Teknik penelitian ini menggunakan metode sensus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, dana perimbangan secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, dana perimbangan secara tidak langsung berpengaruh

positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, PAD secara langsung berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dan PAD secara tidak langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nanda Yoga Aditiya & Novi Dirgantari, 2017), Sampel dalam penelitian ini realisasi APBD Kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama tahun 2013-2015. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sugianoor Saipudin, 2023), Hasil analisis regresi linier yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan tidak signifikan terhadap belanja modal dan bernilai positif yang artinya variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki arah hubungan yang signifikan terhadap Belanja Modal tetapi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dana Perimbangan pada kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan memiliki nilai positif dan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. SiLPA pada kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap belanja modal yang artinya variabel Dana Perimbangan dan SiLPA

memiliki hubungan yang searah artinya semakin menurun. Kenaikan variabel Dana Perimbangan dan SILPA pada kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan mempengaruhi belanja modal.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan".

1.2 Perumusan Masalah

Beberapa rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah dana perimbangan, pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran mempengaruhi belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan ?
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan?
4. Apakah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap belanja modal pada pemerintah kab/kota di daerah di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dana perimbangan terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi pembuat kebijakan di tingkat daerah maupun pusat dalam rangka mengoptimalkan penggunaan dana untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Literatur akademik mengenai pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam konteks daerah di luar Pulau Jawa yang sering kali memiliki tantangan dan dinamika yang berbeda.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Selatan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah kabupaten/kota untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan pengelolaan Dana Perimbangan, PAD, dan SiLPA dalam rangka mengoptimalkan belanja modal. Dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah di Sumatera Selatan dalam menyusun kebijakan keuangan yang lebih efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi belanja modal yang optimal.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan daerah dan belanja modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., & Rona, R. (2014). Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal. *Iqtishadia*, 7(1), 179-202.
- Aditya, N. Y., & Dirgantari, N. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2013-2015. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 15(1).
- Ananda, F., & Habiburrahman, H. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada 19 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Periode 2018-2020. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(8), 7437-7448.
- Diana, Anastasia dan Setiawati, Lilis. 2017. *Sistem Informasi Akuntansi, Perancang, Proses, dan Penerapan*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Edizal. (2023) Pedoman Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti, Palembang
- Kadir, Abdul, 2014, *Pengenalan Sistem Informasi*, Edisi Revisi, Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Mulyadi, 2016, *Sistem Informasi Akuntansi*, Selemba Empat : Jakarta.
- Muttaqin, E., Sari, W., Ritonga, P., & Fadillah, D. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten. *Economics, Business and Management Science Journal*, 1(1), 22-28.
- Nadeak, T., & Sari, L. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021. *Prosiding*

Konferensi Nasional Penelitian Dan Pengabdian Universitas Buana Perjuangan Karawang, 3(1), 374-418.

Nasution, S. A., Valentini, P. M., Sarumaha, A., Manurung, A., & Munawarah, M. (2023). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara*. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(3), 1841-1852.

Nasution, S. A., Valentini, P. M., Sarumaha, A., Manurung, A., & Munawarah, M. (2023). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara*. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(3), 1841-1852.

Pasa, S. R., Kawung, G. M., & Rorong, I. P. F. (2023). *Analisis Pengaruh Pad Dan Dana Transfer Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Ke Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Kota Bitung*. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 24(1), 80-94.

Putri, A. (2023). *Analisis Pengaruh Sisa Belanja Modal, Sisa Belanja Non Modal dan Pelampauan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pada APBD Kota Payakumbuh*. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*, 3(2), 412-423.

Sugiarti, N. P. D. E. R., & Supadmi, N. L. (2014). *Pengaruh PAD, DAU, dan SILPA pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai pemoderasi*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 7(2), 477-495.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian*. Alfabeta.

Unanti, F. E. (2023). *Pedoman Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*. Palembang: Unanti Pers.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, 8 Pontificia Universidad
Catolica del Peru 44 (2014).

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004,
2004 CWL Publishing Enterprises, Inc., Madison 352 (2004).

<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cbdv.200490137/abstract>

Zulkarnain, Z. I., & Haryati, T. (2023). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 22(1), 27-37